



BAB I

PENDAHULUAN

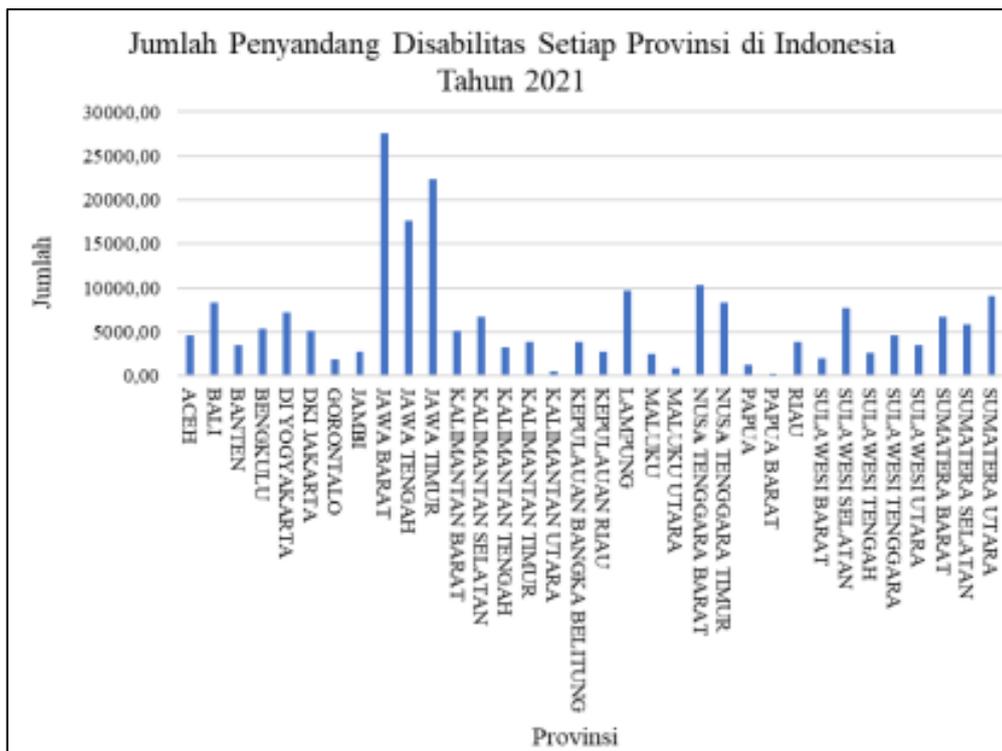
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, dengan total populasi 275 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan populasi terbanyak di dunia. Populasi Indonesia, terdapat bermacam-macam ras, budaya, agama, sosial, dan kebiasaan bermasyarakat, salah satu bentuk keberagaman bermasyarakat adalah masyarakat disabilitas. Menurut Kemensos pada tahun 2020, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 5% dari jumlah penduduk di Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Disabilitas di Indonesia



Sumber : BPS Jawa Timur, 2021

Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam aktivitas bersosial penyandang disabilitas menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi

penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Disabilitas)

Dengan deskripsi diatas, penyandang disabilitas akan menemui hambatan yang sulit mulai dari pemenuhan hak, layanan, fasilitas, dan aksesibilitas, pendidikan hingga lapangan kerja. Menurut Menteri Ketenaga kerjaan (Menaker), Angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dan diskriminasi serta stigma bagi penyandang disabilitas di dunia kerja. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada bulan Febuari 2020 terdapat 17.74 juta jiwa penyandang disabilitas berusia kerja. Sedangkan penyandang disabilitas yang berkerja sebanyak 7.57 juta jiwa. Hal tersebut pun terbukti dari data pada *World Health Organization* (WHO) bahwa sekitar 80% dari penyandang disabilitas di negara berkembang, untuk kebutuhan 50% perawatan medis mereka tidak terpenuhi, penyandang disabilitas sering tidak mendapat perawatan yang layak, kebutuhan anak disabilitas tidak terpenuhi telah meningkat pesat karena layanan kesehatan yang minimal. Penyandang disabilitas lebih mungkin mejadi pengangguran dan lebih rentan pada kemiskinan. kemiskinan. Hal tersebut terbukti juga pada Indonesia, berdasarkan data dari riset ekonomi nasional hanya 56% dari anak penyandang disabilitas yang lulus dari sekolah dasar dan 3 dari 10 anak disabilitas tidak mengenyam pendidikan, selain itu fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai dari pemerintah, terbukti dari 2250 sekolah luar biasa yang ada di Indonesia 552 sekolah yang berstatus negeri dan sisanya adalah swasta (Kemendikbud, 2018). Pada tahun yang sama juga didakan riset yang menyatakan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas hanya berada pada kisaran 49% dari total jumlah penyandang disabilitas (Risksda, 2018).

Tabel 1. 2 Jumlah Penyandang disabilitas di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Ada Penyandang Cacat	Jenis Kecacatan				
		Netra	Rungu	Wicara	Rungu - Wicara	Daksa
Pacitan	171	132	114	117	81	153
Ponorogo	306	225	175	187	160	230
Trenggale	156	137	108	98	99	142

Tulungagung	270	202	140	184	135	215
Blitar	248	189	137	173	154	195
Kediri	343	248	204	220	151	274
Malang	380	285	190	218	234	296
Lumajang	203	168	111	131	112	137
Jember	230	202	170	183	165	190
Banyuwangi	215	177	125	154	121	173
Bondowoso	217	179	120	137	107	153
Situbondo	133	111	95	99	76	90
Probolinggo	328	259	194	200	207	251
Pasuruan	360	251	190	201	189	254
Sidoarjo	334	217	143	186	177	215
Mojokerto	298	178	128	148	132	199
Jombang	306	236	202	192	195	256
Ngajuk	280	172	137	162	119	178
Madiun	204	122	95	125	103	144
Magetan	234	135	80	116	99	179
Ngawi	213	144	124	132	119	151
Bojonegoro	408	252	187	247	207	252
Tuban	325	231	164	207	180	229
Lamongan	456	282	247	270	238	290
Gresik	339	197	136	164	146	225
Bangkalan	249	193	140	161	137	161
Sampang	186	163	119	102	112	163
Pamekasan	181	141	122	115	108	144
Sumenep	331	268	239	207	209	247
Kota Kediri	43	27	19	17	19	30
Kota Blitar	21	15	2	10	11	17
Kota Malang	57	49	23	23	39	51
Kota Probolinggo	29	20	14	15	12	22
Kota Pasuruan	34	22	9	10	19	30
Kota Mojokerto	18	15	5	9	5	17
Kota Madiun	26	12	13	12	6	21
Kota Surabaya	151	111	75	75	86	129
Kota Batu	24	19	16	14	13	19
Jawa Timur	8.307	8.957	4.512	5.021	4.482	6.112

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018

Provinsi Jawa Timur berdasarkan BPS Jawa Timur, terdapat 31.279 jiwa penyandang disabilitas di Jawa Timur. Dengan total penduduk Jawa Timur terdapat 40.66 juta jiwa. Dengan perbandingan pendudukan dan penyandang disabilitas tersebut tidak didukung oleh fasilitas yang memadai seperti sekolah luar biasa (SLB) terdapat 403 sekolah dengan 73 sekolah negeri dan sisanya swasta.

Kabupaten Mojokerto terletak di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk mencapai 1.16 juta jiwa dan penyandang disabilitas mencapai 974 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Kabupaten Mojokerto sendiri terdapat 10 Sekolah Luar Biasa dengan 1 dengan status negeri dan sisanya berstatus swasta (BPS Jawa Timur, 2022). Dengan data yang miris tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 berencana perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan Inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Mojokerto terdapat di Kecamatan Dlanggu, Gedeg, Kemplagi, Mojosari, Pacet, Sooko, dan Dawar Blandong. Dengan setiap sekolah rata-rata siswa terdapat 65 siswa. Jumlah Penduduk disabilitas di Kabupaten Mojokerto terdapat pada tabel di bawah ini dengan jenis disabilitasnya

Tabel 1. 3 Jumlah Penyandang disabilitas di Kabupaten Mojokerto
Penduduk Menurut Jenis Disabilitas di Kabupaten Tahun 2016-2020

Jenis Disabilitas	Jumlah
Fisik	199
Netra	178
Rungu	128
Wicara	148
Total	653

Sumber :RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026

Pada RPJMD Kabupaten Mojokerto pun tertulis bahwa kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat disabilitas. Dengan adanya isi tersebut memberikan alasan yang kuat untuk adanya wadah rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di Kabupten Mojokerto.

Tabel 1. 4 Tabel Data Isu Strategis Berdasarkan TEMA KLHS

8	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Belum terpenuhinya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas
---	---	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026

Perencanaan desain Rehabilitasi disabilitas dapat menjadi solusi dari isu dan permasalahan diatas. Rehabilitasi Disabilitas merupakan wadah untuk

meningkatkan pengembangan diri maupun ekonomi bagi penyandang disabilitas, dengan didukungnya fasilitas terapi, pengembangan diri, rehabilitasi, hingga pelatihan kerja. Dengan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku yang bertujuan untuk memfokuskan bagi pengguna bangunan terutama penyandang disabilitas, dapat mewartakan kehidupan sosial baik dalam lingkungan maupun lingkungan sekitar.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Merancang bangunan rehabilitasi penyandang disabilitas, sebagai wadah mensejahterakan sosial bagi penyandang disabilitas, yang telah disepakati dalam Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
2. Merancang bangunan Rehabilitasi penyandang disabilitas, dengan pendekatan arsitektur perilaku. Hal tersebut untuk mewujudkan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan standart yang memenuhi bagi penyandang disabilitas dalam Permen Sosial no 7 Tahun 2017, tentang Standar dan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Permen No39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Merancang bangunan Rehabilitasi penyandang disabilitas yang dapat beradaptasi dengan pengguna, sehingga, naik secara arsitektural ataupun aktivitas mandiri.

Sasaran:

1. Mampu menciptakan wadah bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik dengan fungsi terapi, pendidikan, dan pengembangan diri. Guna untuk meningkatkan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik

1.3 Batasan dan Asumsi Perancangan

Batasan dari perancangan Rehabilitasi penyandang disabilitas adalah :

1. Pengguna adalah termasuk dalam Undang-undang Nomer 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu :
 - a. Penyandang disabilitas fisik (SLB D)
 - b. Penyandang disabilitas sensorik (SLB A, SLB B)
 - c. Penyandang berumur dari 13-18 tahun (SMP-SMA)
2. Pengguna adalah termasuk dalam Undang-undang Nomer 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 4
 - a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaki, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat strokem akibat kusta, dan orang kecil
 - b. Penyandang disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netram disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
3. Selain pengguna diatas, pengguna lain adalah :
 - a. Tenaga kerja karyawan
 - b. Tenaga kerja terapis
 - c. Tamu dan masyarakat sekitar
 - d. Tenaga kerja pendidik
4. Batasan kegiatan yang ada pada bangunan adalah :
 - a. Terapi
 - b. Pembelajaran dasar
 - c. Pengembangan keterampilan

Adanya Batasan diatas, hal ini terdapat asumsu dengan tujuan dapat memperkirakan dasaran yang berkaitan denghan perancangan. Adapun asumsu perancangan dari Rehabilitasi penyandang disabilitas, antara lain :

1. Kepemilikan proyek adalah milik swasta
2. Terwadahnya fasilitas terapi dan pengembangan diri bagi penyandang disabilitas
3. Aksesibilitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan terapi bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik.
4. Daya tampung proyek diasumsikan dapat menampung 200 orang

1.4 Tahap Perancangan

Tahapan perancangan dilakukan agar mencapai tujuan dan sarana yang sesuai dalam pengerjaan Rehabilitasi penyandang disabilitas ini dimulai dari Langkah-langkah berikut :

1. Interpretasi judul

Rehabilitasi penyandang disabilitas fisik dan sensorik sebagai contoh bangunan yang mewadahi kegiatan terapi, pembelajaran, dan mandiri pengguna dengan penerapan arsitektur perilaku, menyesuaikan dengan pengguna bangunan yang memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan.

2. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek Rehabilitasi dengan penggunaan arsitektur perilaku. Data tersebut dapat berupa peraturan, literatur, data angka, dan data penunjang lainnya dari sumber primer maupun sekunder

3. Menganalisa data

Menganalisa data yang telah didapatkan terkait rehabilitasi penyandang disabilitas baik data primer maupun sekunder

4. Mengkaji teori

Mengkaji teori terkait azas dan metode perancangan, literatur, peraturan terkait perancangan rehabilitasi penyandang disabilitas.

5. Merumuskan tema dan konsep

Menyusun gagasan, data, teori, literatur, maupun peraturan menjadi tujuan utama untuk membantu proses perancangan agar tidak keluar jalur.

6. Membuat gagasan ide

Mengembangkan ide yang spesifik dan detail dengan acuan dasar dari konsep dan tema perancangan

7. Gambar Pra-rancangan

Merealisasikan desain menjadi gambar, seperti *siteplan*, *layoutplan*, denah, potongan, tampak, dan utilitas

1.5 Sistematik Penulisan

Sistematika penyusunan laporan perencanaan dan perancangan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik, sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang memilih judul, tujuan dan sasaran rancangan, batasan dan asumsi rancangan, dan tahapan rancangan.

BAB II Tinjauan Obyek Perancangan

Berisi kajian tentang interpretasi judul, literatur yang menunjang rancangan, serta studi kasus serupa yang dapat dijadikan acuan

BAB III Tinjauan Lokasi

Berisikan pertimbangan dan penjelasan dalam memilih lokasi yang terletak di Kabupaten Mojokerto

BAB IV Analisis Perancangan

Analisa perancangan meliputi analisa terhadap site, ruangan, massa bangunan, fasilitas yang menunjang, serta bentuk dan tampilan pada bangunan

BAB V Konsep Perancangan

Berisikan rumusan fakta, isu, dan goal, tema perancangan, metode perancangan yang meliputi tatanan massa, bentuk dan tampilan, ruang dalam, konsep struktur, utilitas, pencahayaan, penghawaan, fasilitas penunjang, dan lainnya